

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Opini publik merupakan aspek penting, karena menggambarkan pandangan dan sikap masyarakat terhadap suatu isu maupun kebijakan. Opini publik tidak selalu positif, melainkan ada juga yang negatif. Opini negatif lebih mudah terbentuk dibandingkan opini publik positif atau opini publik yang menguntungkan, terlebih lagi pada instansi pemerintah yang saat ini masyarakat memandang dengan sentimen negatif, karena masyarakat bisa saja langsung meyakini informasi yang tersebar tanpa memeriksa kebenarannya terlebih dahulu. Untuk mengelola opini publik agar tidak terbentuk dengan negatif dan merugikan instansi, haruslah dikelola oleh seorang humas instansi. Media sosial instagram menjadi salah satu wadah untuk membentuk dan mengelola opini publik positif dan menguntungkan instansi.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memegang peranan penting dalam suatu daerah. Data yang diambil dari *website* dprd.Garutkab.go.id, DPRD Berperan sebagai lembaga legislatif yang memiliki tiga fungsi, yakni berhubungan dengan pembentukan peraturan daerah, memiliki kewenangan dalam anggaran daerah (APBD) dan memiliki otoritas untuk mengontrol pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan lainnya beserta dengan kebijakan pemerintah daerah. Dalam menjalankan fungsinya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut tidak hanya berfokus pada ketiga hal tersebut, melainkan juga membangun ikatan dengan publik untuk meningkatkan transparansi dan pandangan positif.

Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam struktur tata pemerintahan daerah membawa konsekuensi peran yang luas. Asmawi (2014: 4). Tugas DPRD tidak hanya menyampaikan suara rakyat, melainkan juga ikut berkontribusi dalam menjalankan pemerintahan daerah bersama kepala daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan memiliki kedudukan sebagai komponen penyelenggara pemerintah daerah. Di satu sisi, DPRD menjalankan fungsi politik representasi untuk mengartikulasikan kepentingan publik. Di sisi lain, kedudukan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah mewajibkan lembaga ini untuk menjalin hubungan kerja konstruktif dengan Kepala Daerah. Implikasi dari kedudukan ini adalah bahwa fungsi pengawasan (*controlling*), pembentukan peraturan (*legislation*), dan penganggaran (*budgeting*) yang dimiliki DPRD tidak boleh dimaknai sebagai upaya saling menjatuhkan antarlembaga, melainkan sebagai instrumen untuk memastikan bahwa tata kelola pemerintahan daerah berjalan transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan observasi pra-penelitian yang dilakukan, Penerimaan audiensi menjadi bentuk bukti nyata bahwasanya DPRD Kabupaten Garut melaksanakan perannya untuk menampung suara rakyat. Penerimaan audiensi ini kerap kali diajukan oleh kelompok penekan (*pressure group*) seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi mahasiswa, media massa. Kelompok penekan merupakan kelompok masyarakat yang berusaha untuk mengubah kebijakan yang dikeluarkan DPRD, akan tetapi cara untuk mengubahnya kerap kali menggunakan cara yang agresif.

Sebuah instansi pemerintah maupun perusahaan membutuhkan opini publik. Opini publik yang terbentuk akan sangat menjadi penentu keberadaan instansi maupun perusahaan. Pembentukan opini publik merupakan salah satu tugas yang mesti dilakukan oleh seorang praktisi humas, baik perusahaan, lembaga maupun instansi pemerintah. Seorang praktisi humas haruslah lihai dalam merencanakan pembentukan opini publik yang menguntungkan bagi perusahaan, lembaga maupun instansi pemerintahan. Era sekarang opini publik sangatlah dengan mudah terbentuk melalui pesatnya teknologi, salahsatunya adalah dengan keberadaan media sosial.

Media sosial menjadi salah satu kemudahan yang disuguhkan teknologi kepada praktisi humas dalam pembentukan opini publik Syarief (2017: 262) menjelaskan “Media sosial memiliki kelebihan berupa aksesibilitas yang tinggi, memungkinkan khalayak mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Kecepatan penyampaian pesan pada platform ini mampu menghasilkan umpan balik (*feedback*) dari publik secara instan, sehingga memicu pembentukan opini publik secara lebih cepat dan masif.” media sosial tidak sekadar berfungsi sebagai saluran distribusi informasi, melainkan sebagai katalisator dalam pembentukan opini publik. Kombinasi antara aksesibilitas yang tanpa batas ruang dan waktu serta kemampuan menghasilkan umpan balik secara *real-time* menciptakan ruang publik digital yang sangat responsif. Implikasi teoritis dari fenomena ini adalah terjadinya pembentukan opini publik yang bersifat *bottom-up* dan terakselerasi. Suatu isu dapat dengan cepat menjadi perhatian publik dominan karena respons khalayak

saling menguatkan dalam kurun waktu singkat, yang pada akhirnya memengaruhi diskursus publik hingga pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan.

Informasi akan cepat tersebar luas jika dipublikasikan melalui media sosial, mengingat perannya yang besar dalam memengaruhi publik. Melihat hal ini, seorang praktisi humas mestinya dapat menjadikan keadaan ini sebagai peluang untuk membentuk opini publik yang positif bagi perusahaan, lembaga maupun instansi pemerintah. Media sosial menjadi wadah bagi perusahaan, lembaga, maupun instansi pemerintah dalam meninjau opini yang tengah beredar di kalangan publik, hal ini dikarenakan media sosial merupakan media yang bersifat dua arah, salah satunya yaitu Instagram.

Penyesuaian dengan kemudahan bermedia sosial saat ini, nyatanya harus diiringi dengan penguasaan dari karakteristik media sosial yang akan digunakan Sya'diah (2020: 15) Menjelaskan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Subang membentuk opini publik melalui unggahan di Facebook, serta memanfaatkan seluruh fitur Instagram seperti Feeds, Story, IGTV, Live Streaming, dan Highlights. Pemanfaatan Facebook dan variasi fitur Instagram secara menyeluruh tidak hanya memperluas jangkauan diseminasi informasi publik, tetapi juga menciptakan interaksi yang transparan dan interaktif guna mengonstruksi opini publik positif terhadap kepemimpinan daerah.

Media sosial disukai banyak kelompok kepentingan karena bisa membentuk opini publik dan menjadi jembatan komunikasi langsung dengan masyarakat. Alfifa., et al (2025:7) Besarnya pengaruh media sosial dalam mengarahkan opini publik menjadikannya makin memikat bagi berbagai kelompok kepentingan. Hal

ini terjadi karena media sosial berfungsi sebagai jembatan komunikasi publik yang menghubungkan para komunikator—baik publik maupun politik—secara langsung dengan masyarakat. Keberhasilan komunikasi publik saat ini tidak lagi ditentukan oleh seberapa besar ruang media formal yang dimiliki, melainkan seberapa efektif komunikator memanfaatkan media sosial untuk membangun keterlibatan (*engagement*) langsung dengan publik. Teori yang digunakan dalam penelitian tersebut menggunakan Analisis Media Siber (AMS).

Perkembangan media sosial telah mengubah cara masyarakat menerima berita dan informasi. Kartika (2026: 11) hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial membentuk opini publik melalui Kepesatan penyebaran informasi, pengaruh konten media sosial, rekayasa narasi oleh *buzzer* atau aktor digital, serta kecenderungan cara berpikir individu sebelum ia mengakses informasi. Kepesatan penyebaran informasi di media sosial membuat suatu isu dapat menjadi viral dalam hitungan menit. Kecepatan ini sering kali mengabaikan proses verifikasi fakta, sehingga masyarakat cenderung menyerap informasi secara spontan. Waktu untuk berpikir kritis terdistorsi oleh dorongan untuk merespons informasi yang terus diperbarui secara *real-time*.

Seorang praktisi humas haruslah dapat menguasai semua fitur yang terdapat dalam media yang akan dijadikan wadah untuk penyebaran informasi. Mempelajari fitur – fitur yang ada dalam media, dapat menjadi salah satu cara untuk membentuk opini publik yang positif terhadap perusahaan, lembaga maupun instansi pemerintah. Aktif dalam menggunakan fitur – fitur yang ada dalam media sosial

akan membantu meningkatkan interaksi dan kepercayaan publik terhadap perusahaan, lembaga maupun instansi pemerintahan.

Berdasarkan data pra penelitian yang didapatkan, Humas DPRD Kabupaten Garut memiliki akun di laman Instagram dengan *Username* @dprdGarutkab. Memiliki 3,512 pengikut 658 unggahan, pengikut akun @dprdGarutkab didominasi oleh laki – laki, sebanyak 65% dan pengikut Perempuan sebanyak 35%. Pengikut dari akun media sosial Instagram @dprdGarutkab juga tidak hanya masyarakat yang berdomisili Garut saja, terdapat masyarakat dari kota yang berbeda pun mengikuti akun Instagram milik instansi pemerintahan DPRD Kabupaten Garut (Narasumber : Irfan, 2025).

Data yang didapatkan peneliti ketika pra penelitian, bahwasannya dari postingan penerimaan audiensi dapat memicu munculnya opini publik. Opini publik yang beredar di tengah masyarakat dapat diketahui melalui komentar yang dilontarkan oleh publik, terlihat pada postingan yang diunggah pada 8 Januari 2025, mendapatkan suka sebanyak 80 dan jumlah komentar sebanyak 17. Berdasarkan keseluruhan komentar yang dimuat, 17 komentar dikategorikan sebagai komentar yang membangun (positif). Rentang periode Oktober 2024 s/d Februari 2025, terdapat 59 unggahan dengan mendapat komentar positif sebanyak 22, komentar negatif sebanyak 2 dan 6 komentar yang tidak selaras dengan kepentingan instansi pemerintah. Fitur komentar di media sosial terutama Instagram, dapat menjadi wadah untuk meninjau sejauh mana publik memiliki pandangan kepada suatu instansi pemerintah.

Berdasarkan data pra penelitian pada akun Instagram @dprdGarutkab, tim humas melakukan desain postingan yang selaras untuk setiap unggahannya. Unggahan yang disajikan dalam laman Instagram @dprdGarutkab merupakan sejumlah kegiatan yang dilakukan oleh anggota dewan, seperti penerimaan audiensi, penerimaan Kunjungan dan kegiatan anggota dewan ketika menghadiri undangan dari pihak eksternal. Tim humas publikasi mengunggah postingan dengan konsisten untuk setiap kegiatan yang dilakukan oleh anggota dewan.

Berdasarkan literatur yang ada, banyak yang meneliti pembentukan opini publik melalui media sosial. Namun terdapat sedikit penelitian dengan objek penelitian pemerintah daerah tingkat kabupaten dan menggunakan konsep pembentukan opini publik dari Ferdinand Tonnies.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti aktivitas humas DPRD Kabupaten Garut dalam membentuk opini publik positif, hingga terbentuknya opini publik yang menguntungkan bagi instansi DPRD Kabupaten Garut. Peneliti pun meninjau bahwasanya humas DPRD Kabupaten Garut, aktif dalam menggunakan media sosial terutama Instagram.

Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dikarenakan peneliti akan menarasikan secara mendalam terkait aktivitas humas DPRD Kabupaten Garut dalam membentuk opini publik melalui media sosial Instagram, dengan menggunakan paradigma konstruktivisme, karena peneliti melihat suatu realitas sosial dikonstruksikan.

1.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini yaitu bagaimana upaya humas DPRD Kabupaten Garut membentuk opini publik positif melalui media sosial Instagram. Selaras dengan fokus penelitian tersebut, pertanyaan penelitian sebagai berikut :

- 1) Bagaimana strategi komunikasi Sekretariat DPRD Kabupaten Garut dalam memperkuat opini publik yang padat dan stabil (*die feste*) melalui media sosial instagram?
- 2) Bagaimana strategi komunikasi Sekretariat DPRD Kabupaten Garut dalam mengelola opini publik cair dan mudah berubah (*die flüssige*) melalui media sosial instagram?
- 3) Bagaimana strategi komunikasi Sekretariat DPRD Kabupaten Garut dalam mengelola dinamika opini publik gas dan tidak stabil (*die luftartige*) melalui media sosial instagram?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari fokus penelitian dan pertanyaan penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji realitas mengenai :

- 1) Mengetahui strategi komunikasi Sekretariat DPRD Kabupaten Garut dalam memperkuat opini publik yang padat dan stabil (*die feste*) melalui media sosial instagram
- 2) Mengetahui strategi komunikasi Sekretariat DPRD Kabupaten Garut dalam mengelola opini publik cair dan mudah berubah (*die flüssige*) melalui media sosial instagram

3) Mengetahui strategi komunikasi Sekretariat DPRD Kabupaten Garut dalam mengelola dinamika opini publik gas dan tidak stabil (*die luftartige*) melalui media sosial instagram

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi manfaat bagi peneliti yang ingin meneliti proses pembentukan opini publik dengan menggunakan konsep pembentukan opini publik dari Ferdinand Tonnies yang terdiri dari tiga elemen utama, yakni *Die Feste* (opini publik padat dan stabil), *Die Flussige* (opini publik cair dan mudah berubah) dan *Die Luftartige* (opini publik gas dan tidak stabil).

1.4.2 Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemaslahatan bagi beberapa pihak di instansi yang berkaitan dengan proses pembentukan opini publik, khususnya di DPRD Kabupaten Garut dapat menjadikan penelitian ini sebagai saran. Proses pembentukan opini publik melalui media sosial instagram oleh humas DPRD Kabupaten Garut.

Bagi praktisi humas, penelitian ini dapat memberikan andil sebagai rujukan dalam membentuk opini publik di suatu instansi pemerintah.

Bagi DPRD Kabupaten Garut, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan evaluasi dalam pembentukan opini publik instansi pemerintah melalui media sosial instagram.

1.5 Landasan Pemikiran

1.5.1 Hasil Penelitian Sebelumnya

Tinjauan mengenai beberapa penelitian terdahulu dengan tema yang sama bertujuan membandingkan penelitian yang sedang dilakukan sehingga menentukan letak posisi penelitian di tengah-tengah penelitian terdahulu.

1.5.2 Landasan Teoritis

1.5.2.1 Konsep Pembentukan Opini Publik

Opini publik terbentuk saat terjadi peristiwa yang mengandung pro dan kontra, lalu individu akan memiliki pendapat terkait hal tersebut. Menurut sosiolog yang juga merupakan ahli komunikasi asal Jerman, yakni Ferdinand Tonnies, terdapat tiga tahapan untuk membentuk opini publik Tonnies (1922 : 258).

1) *Die Feste*

Opini publik *Die Feste* merupakan opini yang padat dan stabil. Sunarjo (1997: 30) Opini publik *Die Feste* adalah opini yang sudah kuat dan tidak mudah berubah. Opini *Die Feste* dapat dikatakan sebagai tahap akhir atau kesimpulan dari terbentuknya opini publik. *Die Feste* merupakan realisasi dari selesainya proses konstruksi opini publik. Karakteristiknya yang padat dan stabil menunjukkan bahwa publik telah mengambil sikap final terhadap suatu isu atau lembaga. Implikasi teoretis dari kondisi ini adalah tingginya inersia persepsi; opini publik yang sudah mencapai tahap *Die Feste* akan sangat tahan terhadap fluktuasi informasi baru.

Ketika sudah mencapai tahap ini, publik sudah memiliki pandangan terhadap suatu permasalahan. *Die Feste* merepresentasikan tahap di mana diskusi publik yang tadinya dinamis dan cair di media massa/sosial telah mengalami

kristalisasi. Ketika publik berada pada tahap ini, persepsi mereka terhadap isu, kinerja instansi, maupun citra pimpinan daerah telah mengakar kuat dan tahan terhadap fluktuasi informasi jangka pendek. Oleh karena itu, strategi komunikasi instansi publik tidak hanya bertujuan membentuk opini seketika, melainkan mengarahkan opini tersebut mencapai tahap *Die Feste* yang positif dan berkelanjutan.

2) *Die Flussige*

Opini publik *Die Flussige* merupakan tahap kedua. Sunarjo (1997 : 30) Opini publik ini diibaratkan seperti air, opini publik sudah terbentuk, akan tetapi masih dapat dialirkan menurut individu. opini publik tahap lanjutan ini sudah mulai tergabung dan memperoleh pro dan kontra. fase ini menggambarkan kondisi opini publik yang dinamis, Karakteristik utamanya yang menyerupai air menunjukkan bahwa sentimen khalayak belum terkunci pada satu kesimpulan mutlak, melainkan sedang aktif dipengaruhi oleh dinamika pro dan kontra di ruang publik.

Pada tahap ini, opini masyarakat telah terbentuk namun masih bersifat cair dan diwarnai polarisasi pro dan kontra. Dalam konteks komunikasi pemerintahan, tahap *Die Flussige* merepresentasikan fase krusial di mana persepsi publik masih dapat diintervensi dan diarahkan melalui penyampaian informasi yang transparan, persuasif, serta responsif oleh humas/protokol lembaga sebelum pandangan tersebut mengkristal secara permanen.

3) *Der Luftartige*

Opini publik *Der Luftartige* merupakan opini yang bentuknya masih abstrak. Sunarjo (1997 : 30) Opini publik seperti uap/udara, yang mana dalam tahap

perkembangannya masih tidak menentu. Keadaan opini publik pada tahap ini masih belum teratur, yang mana setiap individu mengemukakan pendapatnya berdasarkan pengetahuan yang dimiliki. Fase ini menjadi tahap awal dari opini publik yang dicirikan dengan ketidakpastian pandangan individu. Sifatnya yang menyerupai uap atau udara mengindikasikan belum adanya konsolidasi persepsi di tengah masyarakat, di mana gagasan yang muncul masih murni didasari oleh tingkat pengetahuan subjektif masing-masing individu. Implikasi praktis bagi komunikasi publik adalah pentingnya diseminasi informasi awal yang cepat, akurat, dan jelas oleh instansi untuk memberikan arah dan pijakan fakta sebelum isu tersebut berkembang menjadi perdebatan yang liar di media sosial.

Tahap ini opini publik masih spontan dan didasari oleh asumsi subjektif karena belum adanya kejelasan fakta. tahap ini merupakan titik krusial di mana penyampaian informasi awal secara cepat dan akurat melalui media sosial sangat menentukan apakah opini publik yang masih acak tersebut dapat diarahkan ke persepsi yang kondusif atau justru berkembang menjadi krisis informasi.

1.5.3 Landasan Konseptual

1.5.3.1 Humas Pemerintah

Humas pemerintah merupakan keharusan fungsional dan operasional dalam upaya mempublikasi dan menginformasikan suatu kegiatan untuk kepentingan masyarakat memegang peranan fungsional Rosmala (2024: 271). Humas haruslah ada dalam sebuah instansi pemerintah, karena memiliki tugas untuk menyampaikan informasi kebijakan pemerintah kepada masyarakat, membangun kepercayaan publik dan lainnya. Selain fungsional, praktisi humas pemerintah pun memegang

peranan operasional, yang harus melakukan hal-hal yang bersifat teknis, seperti mengelola media sosial, membuat konten dan lainnya.

Humas Pemerintah memiliki peran ganda yang saling melengkapi, yaitu peran strategis-fungsional dan teknis-operasional. Peran strategis berfokus pada pembentukan kepercayaan publik dan penyampaian arah kebijakan, sementara peran operasional bertindak sebagai eksekutor komunikasi digital melalui pengelolaan media sosial dan produksi konten. Sinergi kedua peran ini memastikan bahwa pesan-pesan pemerintah tidak hanya tersampaikan secara akurat, tetapi juga menarik dan mudah diterima oleh masyarakat modern.

Keberhasilan komunikasi suatu lembaga sangat ditentukan oleh efektivitas fungsi humas di dalamnya Sani, et al. (2020: 223) Tidak dapat dipungkiri bahwasanya keberadaan praktisi humas, baik swasta maupun pemerintah sangatlah penting, keberadaan praktisi humas dalam instansi berperan untuk menciptakan citra positif publik terhadap lembaga dan begitupun sebaliknya. Praktisi humas memegang peran krusial sebagai pengelola reputasi yang berlaku secara universal, baik di sektor publik maupun swasta. Peran utama humas menitikberatkan pada pembentukan citra positif guna memperoleh kepercayaan khalayak. Hubungan antara humas dan publik bersifat dua arah strategi komunikasi humas dapat membentuk persepsi publik, sementara dinamika opini yang ada di masyarakat secara langsung juga menentukan reputasi serta arah kebijakan lembaga.

Perkembangan media digital membawa dinamika baru dalam dunia kehumasan Pandiangan et al.(2023: 156) Pembentukan opini publik memang

sebagian tugas dari seorang praktisi humas, meskipun saat ini opini publik bisa lebih cepat terbentuk melalui kemudahan yang disuguhkan oleh hadirnya media sosial, tentunya kemudahan ini menjadi tantangan baru yang harus dihadapi oleh seorang praktisi humas pemerintah. kehadiran platform digital memunculkan paradoks komunikasi: efisiensi penyebaran informasi meningkat pesat, tetapi di saat yang sama menuntut ketanggapan ekstra dari humas pemerintah. Kemudahan akses informasi di era digital tidak hanya mempercepat kristalisasi opini publik, melainkan juga meningkatkan risiko krisis komunikasi apabila dinamika umpan balik netizen tidak dikelola dengan responsif dan presisi.

Fungsi Humas pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (**PERMENPAN**) Nomor 30 Tahun 2011 adalah :

- 1) Membentuk, meningkatkan, serta memelihara citra dan reputasi positif instansi pemerintah dengan menyediakan informasi tentang kebijakan, program dan kegiatan instansi.
- 2) Menciptakan iklim hubungan internal dan eksternal yang kondusif dan dinamis.
- 3) Menjadi penghubung instansi dengan publiknya.
- 4) Melaksanakan fungsi manajemen komunikasi yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemberian masukan dalam pengelolaan informasi.

1.5.3.2 Media Sosial

Media sosial merupakan *platform* berbasis internet yang memungkinkan penggunaanya untuk berkomunikasi dan berbagi jenis informasi berupa gambar, video maupun suara secara interaktif. Qadir (2024 : 2714) Media sosial dapat memberikan kemudahan berinteraksi secara daring, hal yang tidak bisa dilakukan

secara luring, saat ini dapat dilakukan melalui daring. Selain memberikan kemudahan, media sosial pun dapat memberikan dampak negatif yang perlu diperhatikan. Media sosial mempermudah interaksi langsung tanpa batas ruang dan waktu secara lebih fleksibel dibanding komunikasi tatap muka. Meski demikian, kepraktisan ini menyimpan risiko seperti penyebaran informasi yang salah dan meluasnya komentar negatif. Oleh karena itu, humas pemerintah harus mampu memanfaatkan media sosial secara bijak, sembari aktif memantau dan mengantisipasi potensi krisis di ruang digital.

Kehadiran media sosial saat ini sangat memudahkan praktisi humas dalam pembentukan opini publik. Qadri (2020: 51) Media sosial menjadi wadah untuk menyebarluaskan informasi yang dapat menimbulkan perpecahan maupun persekutuan. Dampak tersebutlah yang membuat media sosial terlihat secara langsung dalam memengaruhi opini publik. Penggunaan media sosial yang tepat akan menghasilkan opini publik yang menguntungkan. Meskipun kehadiran media sosial dapat memudahkan tugas seorang praktisi humas dalam menciptakan opini publik, harus diiringi dengan kebijakan dalam penggunaannya. Dikarenakan cepatnya penyebaran informasi di media sosial ini dapat menjadi serangan balik jika seorang praktisi humas tidak dengan bijak menggunakan media sosial.

Untuk melihat berita, publik akan lebih tertarik untuk membaca berita di media sosial, terutama instagram, dikarenakan mempublikasikan berita di media sosial akan lebih bervariasi, dapat menarik pembaca melalui desain, *font* dan gaya penulisan *caption* yang lebih sederhana dan mudah untuk dipahami publik.

1.6 Langkah – langkah Penelitian

1.6.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut. Berdasarkan penelitian yang akan dilaksanakan, lokasi tersebut memiliki ketersediaan sumber data penelitian yang diperlukan oleh peneliti. Peneliti tertarik melakukan penelitian di tempat tersebut sesuai dengan data yang peneliti dapatkan seperti yang tertera di latar belakang.

Data tersebut menunjukkan bahwa di era ini, masyarakat memiliki kebebasan dalam beropini di media sosial, yang mana setiap lembaga, perusahaan maupun instansi pemerintah memiliki strategi pengelolaan dan penyelesaian yang berbeda terhadap opini yang tengah beredar di masyarakat melalui media sosial. Data tersebut juga menunjukkan DPRD Kabupaten Garut aktif dalam mengelola media sosial dalam pembentukan dan penyelesaian opini publik.

1.6.2 Paradigma dan Pendekatan

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini yaitu konstruktivisme, yang mana paradigma ini menyatakan bahwa realitas sosial diciptakan melalui konstruksi sosial oleh manusia. Peneliti dengan menggunakan paradigma konstruktivistik akan mencoba mengkaji sebuah realitas pembentukan opini publik melalui media sosial. Pentingnya penggunaan media sosial merupakan realitas sosial yang terbangun di masyarakat saat ini. Guba dan Lincoln dalam Harahap (2020: 31) Paradigma Konstruktivisme mendasarkan pada dua hal utama, yakni kepercayaan dan keaslian. paradigma konstruktivisme menekankan validitas penelitian pada aspek kepercayaan (*trustworthiness*) dan keaslian (*authenticity*). Kepercayaan menuntut peneliti untuk memastikan ketepatan penafsiran atas

fenomena sosial yang diteliti, sedangkan keaslian menjamin bahwa pandangan serta pengalaman subjek diungkap secara murni dan tanpa manipulasi. Dalam konteks analisis opini publik, kedua prinsip ini menjadi landasan untuk memahami bagaimana masyarakat secara alami mengonstruksi persepsi mereka terhadap kinerja lembaga atau pimpinan di media sosial.

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif. Nasution (2023: 34) Pendekatan kualitatif membantu memahami tentang fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Pendekatan kualitatif berfokus pada kedalaman pemahaman eksplanatif terhadap pengalaman subjek penelitian. Pendekatan ini menempatkan subjek sebagai pusat informasi guna mengungkap makna, persepsi, dan motif mendasar di balik suatu fenomena sosial secara alamiah. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara mendalam bagaimana praktisi kehumasan mengelola komunikasi digital sekaligus bagaimana masyarakat mengonstruksi opini mereka di media sosial.

Tujuan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif untuk mencari kejelasan dalam pembentukan opini publik melalui pengelolaan media sosial di bagian humas DPRD Kabupaten Garut dengan mencari data langsung pada pelaku yang terlibat dalam kegiatan tersebut.

1.6.3 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan fokus kepada suatu fenomena penelitian. Peneliti menggunakan metode deskriptif berupaya memaparkan setiap kondisi objek penelitian dengan mendeskripsikan yang menjadi objek penelitian. Sahir (2021: 6) Metode deskriptif

merupakan penelitian yang menggambarkan suatu fenomena dengan data yang akurat dan diteliti secara sistematis. Metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fenomena penelitian secara nyata dan menyeluruh. Penggunaan data yang tepat serta langkah kerja yang teratur memastikan analisis yang dihasilkan sesuai dengan kondisi di lapangan.

1.6.4 Jenis dan Sumber Data

1.6.4.1 Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini merupakan data kualitatif, karena penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Nasution (2023: 91) Data kualitatif merupakan data yang dapat mencakup hampir semua data yang bersifat bukan hitungan. Data kualitatif fokus pada data yang bersifat narasi. Jenis data kualitatif juga tidak dapat diukur besar kecilnya dan data ini dihasilkan melalui proses wawancara. Data kualitatif berfokus pada bentuk narasi dan penjelasan penuh makna, bukan berupa angka. Karena tidak diukur secara statistik, data ini bisa mendalam dalam menangkap sudut pandang serta pengalaman pribadi narasumber. Penggunaan wawancara sebagai cara utama membuat data yang didapat terasa asli dan sesuai fakta untuk menjelaskan fenomena komunikasi yang diteliti.

Jenis data yang dikumpulkan merupakan semua data mengenai pembentukan opini publik melalui media sosial Instagram oleh Humas DPRD Kabupaten Garut.

1.6.4.2 Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data yang didapatkan peneliti adalah sumber data primer. Sugiyono (2013: 225) Sumber data primer merupakan sumber data yang secara langsung

didapatkan dari narasumber. Data primer didapatkan melalui wawancara mendalam dan observasi dengan narasumber yang secara langsung tersibat dalam proses pembentukan opini publik instansi melalui media sosial instagram.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang didapatkan peneliti ialah berupa referensi dan data pendukung. Sugiyono (2013: 225) Sumber data sekunder merupakan data yang didapatkan secara tidak langsung, melalui dokumen, jurnal, buku. Data sekunder yang dihasilkan juga harus berkesinambungan dengan pembentukan opini publik instansi pemerintah melalui media sosial instagram. Peneliti menggunakan data sekunder untuk memenuhi data yang tidak bisa didapatkan langsung dari sumber dan harus menggunakan pihak ketiga.

1.6.5 Informan Penelitian

Teknik pemilihan informan dalam penelitian merupakan pokok penting dalam memperoleh data yang akurat dan mendalam. Pemilihan informan dalam penelitian ini bersifat fleksibel, yang mana peneliti dapat menambah jumlah informan di tengah proses penelitian, jika informan sebelumnya dirasa masih kurang dan peneliti dapat mengurangi informan, jika dirasa jumlah informan sudah cukup. Spradley dalam Nasution (2023: 88) Hampir setiap orang dapat dijadikan sebagai informan, tapi tidak setiap orang dapat menjadi informan yang baik. pemilihan narasumber dalam penelitian kualitatif menuntut selektivitas yang ketat. Meskipun setiap individu dapat memberikan informasi, hanya informan yang memenuhi kriteria tertentu seperti memiliki pengalaman langsung, penguasaan masalah, serta kemampuan berkomunikasi secara jujur yang dapat dikategorikan sebagai informan yang baik

Informan yang dipilih dalam penelitian ini merupakan pihak-pihak yang mengetahui terkait fenomena dan kondisi pada instansi Creswell (2018: 124). Pihak-pihak tersebut dianggap sebagai sumber utama yang terjun langsung berkaitan dengan setiap unggahan di media sosial instagram. Informan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- 1) Sekretaris DPRD Kabupaten Garut, sebagai pimpinan tertinggi di Sekretariat DPRD Kabupaten Garut yang memegang peran strategis dan manajerial dalam proses pembentukan opini publik DPRD Kabupaten Garut.
- 2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian bagian yang akan menjamin kelancaran surat aspirasi masyarakat, pengarsipan dokumen dan profesionalisme aparatur Instagram
- 3) Kepala Bagian Umum sebagai bagian yang bertanggung jawab dalam pengelolaan media sosial, keprotokolan dan penerimaan aspirasi publik.
- 4) Kepala Bagian Fasilitasi dan penganggaran sebagai bagian yang menjamin transparansi APBD, pengawalan aspirasi dan fasilitasi pengawasan anggaran.

Peneliti berharap dapat menggali informasi yang lebih mengerucut dan relevan yang nantinya dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana proses pembentukan opini publik terbentuk. Pemilihan informan ini memastikan bahwa data yang dikumpulkan sesuai dengan tujuan penelitian dan dapat menjawab pertanyaan penelitian secara lebih efektif.

1.6.6 Teknik Keabsahan Data

Penelitian ini mengaplikasikan teknik triangulasi sebagai metode penetapan keabsahan data. Sugiyono (2013: 241) Triangulasi diartikan sebagai teknik untuk memeriksa kebenaran dalam suatu penelitian, juga bersifat multiperspektif. Metode

ini digunakan sebagai metode untuk meningkatkan kredibilitas dan validitas hasil temuan penelitian kualitatif yang kemudian dapat ditarik kesimpulan yang lebih bisa diterima kebenarannya. triangulasi berfungsi sebagai teknik pengujian kebenaran data dengan menggabungkan beberapa perspektif. Cara ini dipakai untuk memperkuat mutu dan keabsahan temuan kualitatif, sehingga kesimpulan penelitian yang ditarik menjadi lebih meyakinkan.

Terdapat beberapa jenis triangulasi dalam penelitian kualitatif, yaitu triangulasi sumber data. Penggunaan triangulasi memungkinkan peneliti supaya tidak sekedar mengolektifkan data secara beragam, melainkan juga menguji kredibilitas data dengan membandingkan temuan yang ditemukan melalui berbagai sumber informasi.

Dalam implementasinya, peneliti menggabungkan data yang didapat dari lapangan untuk memperkuat analisis dan memudahkan pengelolaan informasi. Pendekatan ini melibatkan penggunaan beberapa metode pengumpulan data, seperti wawancara mendalam dan observasi. Setiap teknik akan memberikan pandangan yang berbeda, akan tetapi saling melengkapi. Data hasil wawancara mendalam dan observasi tersebut dicantumkan pada lampiran, untuk memperkuat validitas penelitian.

1.6.7 Teknik Pengumpulan Data

1) Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam merupakan proses yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dan bertukar ide untuk penelitian dengan sistem tanya jawab yang mendalam, dalam artian menggali setiap pertanyaan yang dinyatakan oleh informan. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak

terstruktur dan tidak memiliki keterbatasan, dalam artian dapat dilakukan secara luring maupun daring Sugiyono (2013: 138). Melalui wawancara mendalam, peneliti dapat memperoleh informasi yang mendalam dan terbuka dengan masalah dan fokus penelitian.

Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam memungkinkan peneliti untuk menggali pemikiran informan yang tidak bisa didapatkan melalui pertanyaan tertutup.

1.6.8 Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif dapat dikatakan lebih kompleks jika dibandingkan dengan penelitian kuantitatif. Analisis data kualitatif mengharuskan peneliti menguasai teori agar persepsi yang tercipta berdasar pada pengetahuan ilmiah Sahir (2021: 47) terdapat tiga teknik analisa data kualitatif, yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Tiga teknik analisa data tersebut yaitu:

1) Reduksi Data

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang bersifat menajamkan, membuang yang tidak perlu dan menyusun data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Reduksi data berfungsi menyederhanakan sekumpulan informasi mentah dari lapangan agar lebih mudah dianalisis. Langkah ini mencakup penyaringan data sesuai fokus masalah, penghapusan informasi yang tidak penting, serta pengorganisasian data secara sistematis. Hasil pengelompokan yang terstruktur ini menjadi landasan kuat bagi peneliti untuk merumuskan kesimpulan akhir secara tepat.

Angka-angka yang akurat.
n
impulan merupakan hasil analisis yang
menarik kesimpulan menjadi tahap
melakukan penelitian secara komprehensif
akhir, maka
Dikatakan. Dengan demikian, temuan

SUNAN GUNUNG DJATI

jadi pernyataan

SUNAN GUNUNG DJATI

jadi pernyataan

SUNAN GUNUNG DJATI

No	Daftar Kegiatan`	November 2025	Desember 2025	Januari 2026	Februari 2026	Maret 2026	April 2026
1	Tahap Penelitian : Observasi dan Pengumpulan Data						

	Pengumpulan data penelitian proposal						
	Penyusunan proposal penelitian						
	Bimbingan proposal penelitian						
	Revisi proposal penelitian						
2	Tahap Kedua : Usulan Penelitian						
	Sidang usulan penelitian						
	Revisi susulan penelitian						
3	Tahap Ketiga : Penyusunan Skripsi						
	Pelaksanaan penelitian						

	Analisis dan pengolahan data						
	Penulisan dan penyusunan laporan						
	Bimbingan skripsi						
4	Tahap Keempat : Sidang Skripsi						
	Bimbingan akhir skripsi						
	Revisi skripsi						